
SISTEM REKRUTMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MENENTUKAN CALON GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Jauhar Madani^a, Dimas Nanang Khoirul Huda^b, Abi Waqos^c, Muji Purnomo^d

^{a,b,c,d} Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

E-mail: abiswaqos16@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 mengalami dinamika dalam hal rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis rekrutmen PDI Perjuangan serta hal yang melatarbelakangi PDI Perjuangan dalam mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 terlihat pragmatis dan elektoralis dimana pengusungan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan membasiskan terhadap distribusi sumber-sumber materil. Selanjutnya orientasi partai dalam pengusungan adalah hanya kepada calon yang memiliki potensi untuk menang dalam pemilihan umum. Kemudian tidak ada kewenangan partai di tingkat lokal untuk merekomendasikan alih-alih menentukan terkait pengusungan calon artinya partai politik dalam penentuan calon diputuskan oleh partai politik di tingkat pusat.

Kata Kunci: *Rekrutmen, Partai Politik, Pemilihan Gubernur Jambi*

INDONESIAN DEMOCRACY PARTY RECRUITMEN SYSTEM THE STRUGGLE TO DETERMINE JAMBI PROVINCE GOVERNOR CANDIDATES IN 2020

ABSTRACT

The election of candidates for the Governor and Deputy Governor of Jambi Province in 2020 experienced dynamics in terms of recruitment carried out by the Jambi Province PDI-P. The objectives to be achieved in this study are to identify and analyze the recruitment of the PDI-P and the reasons behind the PDI-P in carrying out the candidates for Governor and Deputy Governor of Jambi Province in 2020. In this study, a qualitative descriptive approach was used. The result of this study indicate that the PDI-P recruitment process in the 2020 Jambi Governor and Deputy Governor Elections looks pragmatic and electoral where the promotion carried out by the PDI-P is based on the distribution of material sources. Furthermore, the party's orientation in carrying is only to candidates who have the potential to win in the general election. Then there is no party authority at the local level to recommend instead of determining regarding the nomination of candidates, meaning that political parties in determining candidates are decided by political parties at the central level

Kata Kunci: *Recruitment, Political Party, Jambi Governor Elections*

* Corresponding Author. Tel: Abi Waqos
E-mail: abiswaqos16@gmail.com

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang sistem rekrutment Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Berangkat dari perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang besar setelah reformasi pada tahun 1998. Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa pada saat itu membuat semuanya berubah (Khoirun, 2014). Salah satu kemajuan yang terlihat pada perkembangan partai politik kebebasan warga Negara berekspresi serta gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik. Jatuhnya rezim orde baru bukan saja telah menumbuhkan hasrat para tokoh politik, agamawan, pengusaha, dan kalangan intelektual untuk bangkit menggapai kekuasaan melalui partai politik.

Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Dari sisi rekrutmen jabatan politik misalnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (eksekutif), perwakilan (legislatif), dan peradilan (yudikatif) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Menurut Clinton Rossister menyatakan bahwa tidak ada demokrasi

tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai (S. Katz dan William Crotty, 2014). Partai politik hadir di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum (Ramlan Subakti, 2010).

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, peran dan fungsi internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. *Kedua*, partai politik juga mengembangkan tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, disini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (S. Katz dan William Crotty, 2014).

Secara umum partai politik memiliki fungsi, antara lain adalah agar dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan masyarakat. Partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah kaderisasi politik. Kaderisasi adalah pendidikan jangka

panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada seorang kader. Kader adalah anggota, penerus organisasi. Kader harus meyakini nilai-nilai bersama sebagai pembentuk watak dan karakter organisasi. Organisasi, apapun itu mutlak mensyaratkan kaderisasi, terlebih bagi partai politik.

Setiap partai akan mengambil keputusan, pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, ini menunjukkan eksistensi partai politik yang merupakan bagian dari demokrasi. Jauh dari sebelum tahapan (Pemilukada), partai politik membuka penjurangan calon, baik dari internal partai atau dari luar partai politik untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota (Valina Singka Subekti, 2015). Proses rekrutmen merupakan hal yang fundamental untuk mempertahankan eksistensi sebuah partai politik. Kaderisasi ini menciptakan sebuah regenerasi organisasi dengan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan dan wawasan tentang kepemimpinan dan manajemen.

Fungsi dari rekrutmen tersebut ialah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik melalui mekanisme pemilu. Kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya terkait dengan sejarah, misi, visi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan bangsa dan Negara.

Dalam proses rekrutmen juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan

keahlian berpolitik. Oleh karena itu, dengan adanya proses rekrutmen, peningkatan kualitas kepemimpinan akan memberikan hal yang positif dalam menciptakan pemimpin baru bagi organisasi. Proses rekrutmen sebagai tempat untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki kualitas untuk menjalankan organisasi agar dapat terus maju dan berkembang (Insan Harapan Harahap, 2017). Hal tersebut perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Hal tersebut dikarenakan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “Proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART serta perundang-undangan yang berlaku”.

Namun pada kenyataannya, di Provinsi Jambi banyak partai-partai besar yang dianggap gagal dalam proses kaderisasinya, salah satu indikasinya adalah adanya kader partai yang loncat ke partai lainnya atau mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Salah satu contohnya adalah mantan istri Gubernur dua periode Provinsi Jambi periode 1999-2004 dan 2005-2010 H. Zulkifli Nurdin (almarhum) yaitu Ratu Munawaroh, calon wakil gubernur yang sebelumnya adalah kader Partai Amanat Nasional dan kini berpindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpasangan dengan Cek Endra yang merupakan ketua DPW partai GOLKAR Provinsi Jambi.

Jika melihat pilkada serentak 2015 di Jambi, baik di tingkat Provinsi dan lima Kabupaten/Kota, tidak ada satu pun partai yang bias mengusung calonnya sendiri, karena terhambat *parliamentary threshold* menuntut 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu, artinya partai yang ada harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Partai politik mengandalkan jasa survei sehingga hanya calon dengan popularitas dan elektabilitas tinggi saja yang menjadi patokan partai dalam menentukan pasangan calon. Hilangnya aturan untuk menghambat peluang munculnya dinasti politik dalam regulasi juga semakin menambah eksklusivitas dari sirkulasi elit politik lokal (Mochammad Farisi, 2016).

Menjelang perhelatan pemilihan Gubernur Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada Desember 2020, banyak calon kandidat yang berbondong-bondong membangun komunikasi politik dan merapat ke beberapa partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemilik 9 kursi di DPRD Provinsi Jambi sangat diperebutkan, pasalnya partai pemenang pada pemilihan legislatif 2019 di Provinsi Jambi ini memiliki kader yang akan maju pada pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020, yakni Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial yang sempat dikabarkan menjadi pendamping Fachrori Umar dan mantan Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani yang sudah dipastikan mendampingi Al Haris.

Namun sayangnya, sebagai kader murni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kedua bakal calon wakil Gubernur pada pilkada serentak Provinsi Jambi 2020 tersebut tidak mendapatkan

rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan Ratu Munawaroh yang diketahui sebelumnya merupakan kader Partai Amanat Nasional yang mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Semua dinamika ini tidak lain juga merupakan akibat dari sistem rekrutmen partai yang kurang efektif. Karena ketika kaderisasi partai politik gagal, maka yang akan terjadi adalah nilai-nilai politik tidak sampai pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, agar rekrutmen partai politik dapat berjalan dengan baik, maka anggota partai politik harus memiliki pemahaman utuh terhadap visi dan misi partai yang dianutnya, adanya konsolidasi dan manajemen yang baik dari internal partai politik.

Oleh karena itu, sistem rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Tercapai tidaknya tujuan system politik yang baik tergantung pada kualitas kaderisasi politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi kaderisasi politik.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu, pertama oleh Surya Hidayat Bokings tahun 2018, dengan judul "Implementasi Pola Rekrutmen Politik dalam Perspektif Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik". Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam sistem rekrutmen politik mengalami turbulensi dan kelemahan UU

Partai Politik yang membuka ruang bebas kepada pengurus pusat untuk bias menganulir keputusan pengurus daerah perlu diperbaharui kembali (Suryati Hidayat Bokings, 2019).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yuni Femelia pada tahun 2017 dengan judul “Pola Pengkaderan PKB Dalam adalah deskriptif kualitatif, dengan memfokuskan gambaran secara jelas dengan faktual mengenai pola pengkaderan PKB dalam merekrut kader-kader mereka. Meningkatkan Kualitas Berpolitik (Studi Pada DPC PKB Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan memfokuskan pada gambaran secara jelas dengan faktual mengenai pola pengkaderan PKB dalam merekrut kader-kader mereka (Yuni Femelia, 2017).

Perbedaan kedua penelitian tersebut yakni, pada penelitian pertama menjelaskan bagaimana implementasi pola rekrutmen partai politik secara umum dalam perspektif pasal 29 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada penelitian kedua meneliti pola pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan kualitas berpolitik. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, memfokuskan bagaimana pola kaderisasi calon Gubernur Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Jambi tepatnya di Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Digunakannya pendekatan kualitatif, karena teknik pengumpulan data ini lebih cepat digunakan untuk wawancara dari atas ke bawah sehingga

sulit untuk teknik kuantitatif, dengan penelitian kualitatif akan diketahui dengan cara mendalam jika dengan kuantitatif sulit untuk bisa diketahui dengan mendalam (Sugiyono, 2012). Data penelitian berasal dari wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Menentukan Calon Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang meliputi seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peran dalam pemerintahan. Untuk itu partai membutuhkan kader-kader yang berpotensi untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Dengan mempunyai kader-kader yang berpotensi dengan baik, maka partai dapat menentukan pemimpin sendiri dan mempunyai peluang untuk dapat mengajukan calon ke tingkat kepemimpinan local dan nasional . (Subakti, 2010).

PDI Perjuangan di Provinsi Jambi membuka kesempatan luas kepada semua kalangan untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala daerah tentunya dengan mengikuti proses rekrutmen yang sudah ditetapkan oleh PDI Perjuangan yaitu system rekrutmen yang dilakukan bersifat terbuka terhadap anggota baru dan kader PDI Perjuangan yang tentu memiliki landasan tersendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Arsiadi, selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan

Ideologi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi sebagai berikut:

“Dalam hal ini PDI Perjuangan membuka jalan seluas-luasnya bagi siapapun yang siap bergabung dan berkontribusi besar terhadap kemajuan PDI Perjuangan, dan juga kita mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam partai, yaitu AD/ART PDI Perjuangan dan peraturan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 24 tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan. Dan juga proses kaderisasi di PDI Perjuangan dilakukan secara bertingkat. Pertama, kaderisasi di tingkat cabang, kedua, kaderisasi di tingkat provinsi” (Arsiadi, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arsiadi, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, bahwasanya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi membuka jalan seluas-luasnya bagi siapapun yang siap berkontribusi untuk membesarkan PDI Perjuangan, dengan memiliki kader yang loyalitas dan berkualitas pada akhirnya bertujuan untuk berkontestasi merebut kekuasaan secara konstitusi. Sehingga siapapun yang berniat dapat mendaftarkan diri untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Hal ini juga sebagaimana disampikan oleh Bapak Edi Purwanto, selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi sebagai berikut:

“Kaderisasi dilakukan secara bertahap bertingkat dan berlanjut. Bertahap artinya dilakukan mulai dari kader pemula sampai kader senior. Bertingkat dibagi dalam kaderisasi pertama, madya, dan senior. Berlanjut terus dilanjutkan setiap tahun yang diselenggarakan oleh DPC, DPD, serta DPP. Sehingga pola kaderisasi ini lah yang menjadi pertimbangan agar para kader dapat mengisi jabatan di pemerintah” (Purwanto, 2022).

Dari pemaparan tersebut, PDI Perjuangan memiliki pola rekrutmen

politik bagi masyarakat untuk bisa mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Pada umumnya, PDI Perjuangan telah menjalankan salah satu fungsi partai politik sebagaimana diterangkan oleh Ramlan Subakti bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Pola tersebut bertahap dari simpatisan, anggota, aktifis dan kader. Dalam pola yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan secara tidak langsung PDI Perjuangan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui PDI Perjuangan. Pola ini sebanarnya telah diterangkan oleh Ramlan Subakti sebagai seorang yang terkemuka di bidang Akademisi sekaligus praktisi pemilihan umum (KPU) bahwa salah satu fungsi partai politik adalah adanya rekrutmen yang dilakukan partai politik pada masyarakat. Rekrutmen politik tersebut yang memiliki pola dari simpatisan, anggota, aktifis dan kader.

Keunggulan dari PDI Perjuangan di Provinsi Jambi ialah secara aturan partai telah memiliki system kaderisasi yang terstruktur melalui pendidikan dan pelatihan kader adanya keseriusan oleh partai dalam pelaksanaan system pelatihan, pendidikan dan kaderisasi kepada anggota partai. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan diperoleh jika pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan mekanisme sistem pengkaderan yang sudah ditetapkan di dalam aturan partai, dimana pengetahuan tentang kepartaian, terkait ideology, sejarah dan strategi politik dalam PDI Perjuangan dapat berjalan dan terlaksana secara optimal. Hal tersebut juga ditegaskan peneliti dengan Bapak Edi Purwanto Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi menjelaskan bahwa:

“pendekatan yang dilakukan PDI Perjuangan Provinsi Jambi yaitu melalui pelatihan dan Pendidikan kader sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam materi Pendidikan dan pelatihan sebagai seleksi kaderisasi dalam PDI Perjuangan diperlukan untuk dapat menyaring anggota maupun kader yang memang se-asas,seidiologi dan satu tujuan dengan partai, menyipkan kader-kader partai, serta pengurus partai yang berkualitas” (Purwanto, 2022).

Adapun tahap yang lebih spesifik dalam pembahasan yang bersangkutan dengan tujuan peneliti terhadap kaderisasi pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi oleh PDI Perjuangan di atas terbagi beberapa tahapan yaitu tahap penjaringan, penyaringan dan penetapan.

Tahap Penjaringan

Setiap partai politik tentunya memiliki tahapan-tahapan yang berbeda dalam menentukan kandidat dari partainya guna melanjutkan perjuangan partainya kedalam ranah yang lebih nyata yaitu pemerintahan. Dalam kontes ini jika melihat pada PDI Perjuangan, proses penjaringan ini memiliki 2 (dua) tipe sebagai mana yang di jelaskan oleh Bapak Heriyono sebagai berikut:

“pada prinsipnya kita merekrut sebanya-banyaknya, bukan hanya secara kuantitas tapi juga kualitas. Ya sebenarnya ada dua tipe dalam penjaringan rekrutmen politik ini. Pertama kita aktif untuk mencari calon-calon ini. Kedua mereka mendaftar sendiri. Rekrutmen disini bersikap terbuka. Banyak kok contoh-contoh orang yang tadinya bukan anggota PDI Perjuangan tapi dia boleh mendaftar. Jadi kita punya perintah minimal satu tahun sebelum pemilihan daerah harus menjaring. Jadi sekarang mau dia jadi kepala daerah, gubernur, walikota harus dijaring dulu. Tapi ini masih di jarring loh ya” (Heriyono, 2022).

Penjaringan untuk calon pejabat publik di PDI Perjuangan bersifat terbuka namun dalam proses penjaringan melibatkan daerah. PDI Perjuangan memiliki kebijakan partai bahwa satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan, daerah wajib untuk menjaring bakal calon kepala daerah. Menurut bapak Heriyono, proses penjaringannya bisa dari dua arah. Pertama penjaringan internal, yakni penjaringan bakal calon kepala daerah yang berasal dari anggota atau kader PDI Perjuangan. Kedua penjaringan eksternal, yakni penjaringan bakal calon kepala daerah yang berasal dari luar anggota PDI Perjuangan. Biasanya proses penjaringan ini melihat tingkat elektabilitas seseorang dan kecakapan mereka dalam manajerial.

Proses rekrutmen oleh PDI Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020, dimulai sejak dibukanya pendaftaran oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ada beberapa bakal calon yang mendaftarkan dirinya ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi. Para bakal calon merupakan kandidat-kandidat yang memiliki kekuatan politik yang kuat untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada yang merupakan kepala daerah, kader internal partai politik, hingga tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Dalam Internal DPD PDI-P. Wawancara bersama Bapak Zaidan Ismail Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi mengatakan :

“Untuk persiapan pada tahap penjaringan ini langkah pertama membentuk sebuah tim penjaringan untuk verifikasi yang nantinya akan melaksanakan proses seleksi terhadap bakal calon, kemudian kami membuka pendaftaran. adapun nama-nama yang mendaftarkan diri ke PDIP pada penjaringan tersebut. Mereka adalah, Jefri

Amas Hutagalung, Ramli Taha, Al Haris, Safrial, Syarif Fasha, Tigor Sinaga, Abdullah Sani, Zaidan Ismail, Fachrori Umar, Cek Endra dan Ratu Munawaroh. Kemudian Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Provinsi Jambi melaksanakan fit and proper test untuk bakal calon yang mendaftarkan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi di Kantor DPD PDI-Perjuangan Provinsi Jambi, setelah itu hasilnya akan di bawa ke DPP, kemudian DPP yang akan memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada bakal calon yang akan di usung” (Heriyono, Nama Calon, 2022).

Tabel 1. Bakal calon yang mendaftar di PDI perjuangan

No	Nama	Keterangan
1	Safrial	Mendaftar sebagai calon Gubernur
2	Abdullah Sani	Mendaftar sebagai calon Gubernur
3	Zaidan Ismail	Mendaftar sebagai calon Gubernur
4	Jefri Anas Hutagalung	Mendaftar sebagai calon Gubernur
5	Al Haris	Mendaftar sebagai calon Gubernur
6	Ramli Thaha	Mendaftar sebagai calon Gubernur
7	Fahrori Umar	Mendaftar sebagai calon Gubernur
8	Syarif Fasha	Mendaftar sebagai calon Gubernur
9	Tigor Sinaga	Mendaftar sebagai calon Gubernur
10	Cak Endra	Mendaftar sebagai calon Gubernur
11	Ratu Munawaroh	Mendaftar sebagai calon Gubernur

Sumber : Data Olahan

Proses Penyaringan Dan penetapan

Proses penyaringan dan penetapan bakal calon, tahapan ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan melihat hasil dari proses penjarangan yang dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah yang ada di tingkat Provinsi. Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan proses penyaringan dan penetapan terhadap bakal calon yang akan di usung oleh partai politik proses penyaringan dan penetapan yang dilakukan oleh partai diartikan sebagai sebuah proses penyaringan dengan mempertimbangkan kriteria serta syarat yang telah ditentukan oleh partai politik.

Setelah proses penjarangan, DPP kemudian menyaring kembali bakal calon kepala daerah yang didaftarkan melalui DPD. Itu artinya proses nominasi dalam PDI Perjuangan bersifat desentralistik karena penjarangan dilakukan di tingkat daerah. Namun, proses keputusan diserahkan kembali pada tingkat pusat untuk dianalisa ketokohan, solidaritas partai, dan kesediaan tunduk terhadap kebijakan partai.

Menurut Bapak Heriyono, proses sertifikasi untuk pencalonan kepala daerah melalui PDI Perjuangan adalah harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pilkada. Persyaratan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti syarat-syarat yang diatur dalam UU Pilkada (Heriyono, Peraturan Kaderisasi, 2022). Kemudian proses nominasi calon kepala daerah di PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam peraturan partai nomor 04/2015 tentang mekanismen penjarangan pasangan calon PDI perjuangan, yaitu: (PDI-P, 2019-2024).

1. Pendaftaran dibuka oleh struktur mulai pimpinan anak cabang (PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah (DPD).
2. Verifikasi Administrasi tentang bakal calon yang mendaftar.
3. Bakal calon yang lolos verifikasi dilaporkan ke Dewan pimpinan pusat

(DPP). Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, solidaritas partai, dan bersedia tunduk terhadap kebijakan partai.

4. Penetapan yang dilakukan oleh DPP.

Berdasarkan peraturan partai tersebut, pendaftaran dilakukan di tingkat struktur daerah. Kemudian nama-nama yang diajukan tersebut diputuskan di tingkat DPP. Berdasarkan Peraturan partai politik tersebut tentang mekanisme penjarangan pasangan calon PDI Perjuangan system penunjukan langsung identic dilakukan oleh partai politik yang bersifat sentralistik atau terpusat dimana keputusan partai diambil oleh segelintir elit partai yang berada di tingkat DPP. Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, solidaritas partai, dan kesediaannya terhadap kebijakan partai. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Heriyono sebagai berikut,

“Setelah proses penjarangan di tingkat DPD kemudian dari 11 nama yang mendaftarkan diri ke DPD PDIP pada penjarangan ada, Jefri Amas Hutagalung, Ramli Taha, Al Haris, Safrial, Syarif Fasha, Tigor Sinaga, Abdullah Sani, Zaidan Ismail, Fachrori Umar, Cek Endra dan Ratu Munawaroh yang melakukan fit and proper test dimana hasil fit and proper test ditingkat DPD diserahkan ke DPP untuk dilakukan fit and proper test di tingkat DPP selanjutnya. Pada tingkatan DPP, hasil dari penilaian dari DPD akan digabungkan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan hingga pada akhirnya DPP PDIPerjuangan menjatuhkan rekomendasinya kepada Cek Endra dan Ratu Munawaroh, Rekomendasi tersebut diumumkan secara virtual oleh Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani Serentak dengan Provinsi lainnya yang akan melaksanakan” (Heriyono, Proses Penetapan Calon, 2022).

Kemudian, bakal calon tersebut juga harus melalui tahapan fit and proper test yang dilakukan oleh DPP. Hal ini bertujuan untuk menguji para bakal calon, siapakah yang memiliki kualitas lebih unggul. Dan setelah proses yang cukup panjang bakal calon

Gubernur Jambi Cek Endra dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi Ratu Munawaroh akhirnya resmi mendapatkan rekomendasi dari PDI- Perjuangan.

Hal yang Melatarbelakangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Mengusung calon Gubernur Provinsi Jambi Cek Endra dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi Ratu Munawaroh

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang di ikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu Cek Endra dan Ratu Munawaroh, Fachrori Umar dan Safril Nursal serta Al-Haris dan Abdullah Sani. Kendatinya dalam proses rekrutmen pemilihan calon Gubernur dan wakil Gubernur memunculkan banyak kejutan dan penuh dinamika. Jauh sebelum tahapan dimulai, hingga menjelang konstelasi politik terus berubah. Dimulai dari perpindahan kader yang tidak didukung partainya, hingga tarik ulur dukungan partai dan kader yang tidak mengikuti kebijakan partai.

Pada internal PDI Perjuangan yang menetapkan Cek Endra dan Ratu Munawaroh sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi setelah melalui mekanisme kandidasi dari internal partai. Putusan PDI-Perjuangan menjadi perhatian publik karena posisi sosok figur yang dicalonkan bukan berasal dari kader murni PDI Perjuangan baik Cek Endra maupun Ratu Munawaroh.

“Keputusan mengusung Ratu Munawaroh kita melihat dari segi hitung-hitungan yang lebih cermat itu kewenangan DPP. Tentu DPP memutuskan demi kebesaran partai. Selain itu Lewat kader naturalisasi (Ratu Munawaroh), PDI-Perjuangan menarget kemenangan untuk jangka panjang dengan mengusung bu Ratu kita hendak menyiapkan kemenangan lebih besar di Pileg 2024 mendatang. Ratu akan menjadi magnet bagi PDIP, di masa mendatang selain itu

Trah Keluarga Nurdin masih diperhitungkan di Provinsi Jambi. Tentunya secara otomatis akan berdampak kepada kekuatan mesin PDI-Perjuangan sendiri, persoalan kader atau dikaderkan bisa saja. Nomor satu atau dua tidak masalah, sepanjang untuk kepentingan masyarakat Jambi, yang penting bagi kita adalah menang (Purwanto, Pertimbangan , 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat ketika pintu PAN tertutup buat Ratu Munawaroh, PDI Perjuangan malah membenteng karpet merah, berpasangan dengan Cek Endra yang merupakan kader Golkar keduanya maju dalam pertarungan pilkada Jambi. Langkah memilih Ratu dan Cek Endra merupakan pilihan yang tepat dan sesuai bagi partai PDI Perjuangan, karena Ratu merupakan calon wakil yang diperhitungkan dengan kalkulasi masih banyak masyarakat yang mendabakan dan mengenang sosok dari Zulkifli Nurdin (mantan Gubernur Jambi, almarhum Zulkifli Nurdin suami dari Ratu Munawaroh). Selain itu, Ratu juga merupakan satu-satunya keterwakilan perempuan.

Namun, jika melihat secara kalkulasi politik sangat sulit bagi PDI Perjuangan menentukan variabel untuk tidak memberikan dukungan pada Safrial ataupun Abdullah Sani yang merupakan kader murni bagi PDI Perjuangan dengan jangka waktu yang tidak sebentar apalagi jika dasar elektabilitas yang jadi referensi, baik Abdulah Sani maupun Safrial mempunyai basis masa yang jelas dan juga sumber daya yang cukup. Selain itu safrial jasanya yang besar di Tanjung Jabung Barat, dimana saat Pilpres 2019 lalu, Jokowi menang di Tanjung Jabung Barat dan sosok Safrial mempunyai sumber daya yang cukup untuk bertarung pada Pilgub Jambi 2020.

Berdasarkan temuan dilapangan peneliti menganalisis faktor kuat alasan PDI Perjuangan tidak mengusung Abdullah Sani karena Haris-Sani diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, dimana PDI Perjuangan

tidak pernah akan bertemu dengan PKS. Dua partai ini jelas beda idiologinya. PDI Perjuangan dengan Pancasila lurus sedangkan PKS dengan Islam lurus sehingga sulit menyatu. Bahkan hampir di semua level, dua partai ini bahkan menampakkan seterusnya secara terbuka. Begitupun dengan Safrial PDI Perjuangan juga punya alasan kuat kenapa meninggalkan Bupati Tanjung Jabung Barat itu, dari riset yang dilakukan oleh internal partai menunjukkan Safrial dinilai tidak patuh terhadap keputusan partai.

Wawancara bersama Bapak Dr. Pahrudin HM, S.S., MA. selaku Pengamat Politik Provinsi Jambi mengatakan sebagai berikut:

“Kalau kita berbicara dalam konteks kaderisasi dan kandidasi sebetulnya yang normatif itu tadi, artinya visi misinya atau dalam konteks partai ideologinya dari sejak awal sudah dibangun se idiologi tapi problem nya Provinsi Jambi kan tidak, berarti dalam hal ini yang mendasari pilihan terhadap Cek Endra, Fachrori, Haris cenderung ke arah yang pragmatis meskipun dibumbui dengan idealisme, karena untuk membungkus idealisme tersebut maka disebutlah satu visi, satu misi. Tapi sebetulnya partai hari ini cenderung pragmatis kenapa kemudian bisa dikatakan begitu, misal PDI Perjuangan punya 9 (sembilan) kursi di DPRD Provinsi Jambi artinya yang terbesar tidak mau mengusung calonnya sendiri, kalau PDI Perjuangan idealis pasti akan mengusung kader sendiri, apalagi yang bisa kita simpulkan selain dari kata pragmatisme, mungkin kalau PDI Perjuangan ada trauma masa lalu apalagi ketuanya pernah gagal sama HBA, karena untuk apa sudah cukup bahkan Al-haris pun tidak melirik sejak awal, bagi saya ini sangat pragmatis. Adakah partai melakukan survei terkait dengan kandidasi misalnya PDI Perjuangan sebelum menetapkan buk Ratu ada hasil surveinya di publish agak khalayak tau, itu tidak ada. Terus fungsi partai itu apa dari segi pendidikan politik, kaderisasi keduanya tidak dilakukan di Provinsi Jambi, karena yang namanya partai politik itu puncaknya ya jabatan politik ngapain punya partai tapi tidak ada

keinginan menguasai eksekutif, pasti partai politik punya keinginan jadi dari segi itu saja sudah gagal di Jambi. Sehingga karena pragmatis itu menghilangkan fungsi partai politik dan yang terjadi adalah kemungkinan orang-orang yang berkualitas tapi tidak punya hepeng tidak bisa maju” (Pahrudin, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengamat politik Provinsi Jambi sejalan dengan teori dapat digambarkan sejumlah fakta yang belum juga hilang dalam proses kandidasi menunjukkan pragmatisme partai politik. Pertama, proses kaderisasi tidak berjalan ideal di internal partai politik. Kedua, proses mengusung calon bukan semata berdasarkan elektabilitas, integritas dan kapabilitas calon. Hampir semua partai mengalami masalah kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik, atau kader partai yang tidak laku dijual. Sehingga partai berbicara realitas dan mengambil sosok calon non-kader. Dalam situasi politik yang cenderung pragmatis dan transaksional ini menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sistem rekrutmen dalam penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi bahwa penentuan kandidat oleh PDI-Perjuangan di tingkat DPD tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat, akhirnya hubungan kandidat-kandidat hanya sebatas komunikasi di tingkat Provinsi. Sehingga, penentuannya kandidat harus komunikasi intens dengan partai politik di pusat, artinya bersifat sentralistik. Kemudian dalam penetapan calon bersifat tertutup, dimana hanya diketahui oleh segelintir elit dan masifnya pertukaran lobi diantara kandidat dengan petinggi partai di tingkat pusat.

Hal yang melatarbelakangi PDI-Perjuangan sangat pragmatis. Hasil

penelitian menunjukkan sifat partai ”yang pragmatis dalam hal pengusungan pasangan calon, karena hanya melihat popularitas, modal ekonomi, dan masif pertukaran lobi di antara kandidat dengan petinggi partai di tingkat pusat. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya sumber-sumber pertukaran materil dimana keputusan penentuan kandidat tidak dilatarbelakangi oleh platform ideologi. Sehingga banyak kader partai maupun tokoh yang layak dan dianggap mampu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, 1978. *Studi Perbandingan Sistem Politik*, Colin Mac Andrews (Eds), *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah MadaUniversity : Yogyakarta, hlm.29.
- Jonathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu : Yogyakarta, hlm. 16.
- Khoirun. 2014. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta hlm.7
- Labolo Muhadam & Teguh Ilham, 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. PT.Raja Grafindo persada,Jakarta. hlm.15
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 403-404.
- Moleong, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung, hlm. 163.
- Nusa Putra, 2013. *Penelitian Kualitatif IPS*. PT Remaja Rosda, Cetakan Pertama: Bandung. hlm. 63.
- Prof. Dr.A. Muri Yusuf, M.Pd. 2014. *dan Penelitian gabungan Pertama*. Kencana : Jakarta. hlm. 380
- Ramlan Subakti, 2015. *Memahami ilmu politik*. PT, Grasindo : Jakarta. hlm.150
- S. Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook. Partai Politik*. Nusamedia. Bandung. Hlm.7
- Supomo R dan Nurhayati Eti, 2017. *Mnagemen Sumber Daya Manusia*. PT. Yrama Widya. : Jakarta.
- Syamsuddin Haris, 2005. *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki*. PT Gramedia : Jakrta hlm. 180
- Valina Singka Subekti, 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintah Demokrasi*. yayasan Pustaka Obor. Indonesia.

Jurnal Ilmiah

Allan Yanika, *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau. Jom FISIP Vol. 1 no. 2 Oktober 2014*. hlm. 6.

Iriyana dan Risti Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (Sorong : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2018

Mochammad Farisi, *Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal: Studi di Provinsi Jambi Tahun 2015* Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 2, Juli 2016) hlm. 235

Surya Hidayat Bokings, “Implementasi P ola Rekrutmen Politik dalam Perspektif Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Skripsi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. Tahun 2019 Diakses pada tanggal 14 Februari2020 pukul 19:55

Yuni Femelia, *Pola Pengkaderan PKB Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik (Study Pada DPC PKB Kota Bandar Lampung)* Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin Universitas Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2017 Diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 20:52